

BAB III

MONITOR ICRC DALAM PENGHORMATAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI KONFLIK SURIAH

Kepemimpinan Assad dimulai oleh Hafez al-Assad pada 1971 dan terus berlanjut hingga Hafez meninggal. Bashar al-Assad memenangkan pemilu pada 2000 dan kini tengah menjalani periode ketiganya sebagai presiden Suriah. Selama lebih dari empat dekade, pemerintahan demokrasi di Suriah dipimpin oleh keluarga Assad, menutup kesempatan politik bagi golongan lainnya. Kekuasaan di Suriah terbatas bagi keluarga Assad, suku Alawite, dan partai Sosialis Ba'ath, menjadikan politik di Suriah sebagai politik yang diskriminatif. Tuntutan tersebut kemudian ditanggapi dengan cara koersif yang memicu munculnya konflik bersenjata. Bab ini akan membahas mengenai kondisi konflik di Suriah mencakup latar belakang konflik, analisis posisi aktor dan kepentingan aktor, alur konflik, serta gaya berkonflik aktor. Pada bab ini juga akan dibahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama konflik bersenjata di Suriah berlangsung serta upaya-upaya yang telah dilakukan ICRC selama operasi kemanusiaan di Suriah.

A. Konflik Suriah

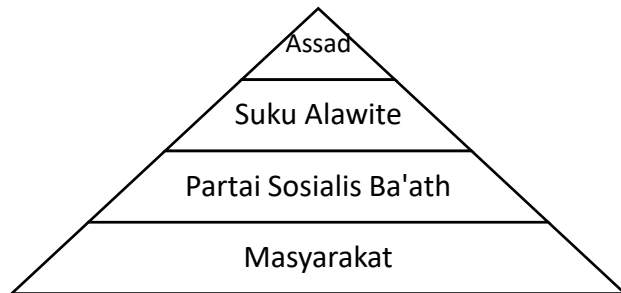
Suriah telah menjadi negara yang melewati banyak periode instabilitas politik sejak kemerdekaannya dari Prancis pada 1946. Sebagai sebuah negara yang terletak di jazirah Arab, ketidakstabilan politik Suriah menjadi sebuah hal yang wajar. Umur sebuah pemerintahan di Suriah tidak pernah melebihi satu tahun hingga Hafez al-Assad menduduki kursi tertinggi pemerintahan pada 1970 (Haran, 2016). Hafez al-Assad meraih kekuasaan bersama Partai Sosialis Arab Ba'ath melalui Revolusi Korektif Suriah. Rezim Assad merupakan rezim yang otokratif, satu-partai, dan sangat totaliter. Rezim mengendalikan semua unit di negara termasuk militer

ekonomi, industri, media, hingga peradilan. Suriah mampu melewati terjangan *Arab Spring* yang menimpa Tunisia dan kawan-kawannya dengan relatif stabil di bawah kepemimpinan Hafez al-Assad.

Bashar al-Assad menjadi suksesor dengan memenangkan kursi kepemimpinan melalui pemilihan umum setelah kematian Hafez di tahun 2000. Kepemimpinan Bashar (selanjutnya disebut Assad) pada mulanya memberikan banyak harapan baru. Assad membawa banyak ide-ide liberal yang menjanjikan, namun dalam beberapa waktu terlihat bahwa prinsip-prinsip utama dalam pemerintah Assad tidak mendapat perubahan. Defisit demokrasi terjadi. Politik diskriminatif yang dimulai oleh Hafez al-Assad tetap tidak berubah pada masa kepemimpinan Bashar al-Assad. Protes terhadap rezim Assad mencuat pada tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan kekerasan. Disinilah perang yang hingga kini menghilangkan ratusan ribu nyawa tersebut bermula.

Konflik Suriah muncul dari kombinasi pergerakan protes masyarakat bawah akan reformasi politik dan ekonomi serta respon Assad yang terlalu koersif terhadap pergerakan tersebut. Kekuasaan Bashar al-Assad memberikan warna progresif yang baru bagi penduduk Suriah hingga beberapa waktu terlihat bahwa pemerintahan berjalan tanpa perubahan, defisit demokrasi terjadi dengan adanya nepotisme dari kalangan terdekat Assad, peredaman protes, dan korupsi serta kediktatoran pemerintah merajalela. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan reformasi ini meletus menjadi perang saudara (Berzins, 2013).

Pertama, meskipun rezim Assad menyatakan kontra terhadap sektarianisme namun tidak bisa dipungkiri bahwa Assad mengambil keuntungan dari penggunaan politik “*divide and conquer*” sebagaimana ia mengambil keuntungan dari grup minoritas seperti Alawite, Kristen, Syiah, dan Sunni Sekuler. Assad menyelenggarakan politik yang diskriminatif disebabkan oleh terbatasnya kekuasaan kecuali bagi keluarganya, sukunya, dan anggota partainya. Segitiga kekuasaan Assad dapat dilihat pada bagan berikut:



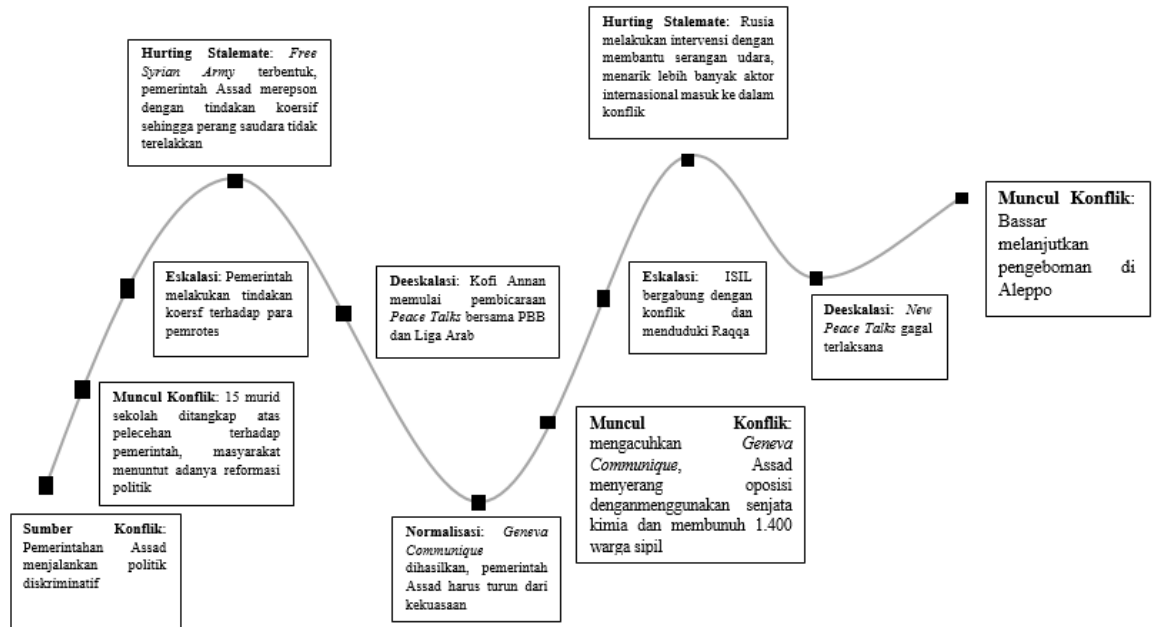
Bagan 3.1 Piramida Kekuasaan Assad di Suriah

Kedua, reformasi ekonomi yang diberikan oleh Assad untuk menstabilkan ekonomi serta menguatkan sektor pasar dengan bantuan pihak swasta ternyata berakhir pada bertambahnya angka pengangguran. Sekalipun nilai investasi telah mengalami kenaikan, namun tingkat kemiskinan di daerah pinggiran Suriah mencapai 62%.

Ketiga, tekanan politik. Selain terinspirasi dari hebatnya kekuatan masyarakat pada negara-negara yang terkena *Arab Spring*, kegagalan reformasi ekonomi serta tuntutan reformasi politik telah membuat banyak orang melakukan protes. Intensitas protes ini semakin menjadi-jadi pada Februari 2011 dimana 15 murid sekolah ditangkap dan disiksa karena menulis mural berupa “*people want the fall of the regime*”. Penangkapan murid-murid sekolah ini telah membuat setidaknya ribuan orang turun ke jalan pada Maret 2011. Pemerintah menanggapi protes dengan tindakan koersif.

Baku tembak terjadi dan banyak pendemo ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Masyarakat lainnya pun segera turut serta melakukan protes terhadap rezim atas kematian saudara-saudara mereka serta kerugian finansial yang terjadi akibat kerusuhan. Pada bulan Juli 2011, Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army terbentuk, menandakan resminya kelompok oposisi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pada September 2011, kelompok oposisi ini secara resmi mengumumkan bahwa oposisi akan mereformasi pemerintah.

Untuk memahami dinamika konflik Suriah dapat dilihat pada bagan 3.2.



Bagan 3.2 Dinamika Konflik Suriah

Dalam konflik Suriah setidaknya terdapat 3 kekuatan utama saat ini (Hausser, 2016) yaitu:

1. Pemerintah dan pendukung rezim Bashar Al-Assad

Kelompok ini termasuk juga militer dan dukungan kekuatan dari negara asing. Kelompok ini menguasai sepertiga dari Suriah termasuk Damaskus dan sebagian dari Aleppo sebagai kota terbesar kedua di Suriah. Secara pendudukan wilayah, dapat dikatakan bahwa kelompok pemerintah sebenarnya lebih unggul ketimbang kelompok lainnya. Selain itu pendukung kelompok ini antara lain terdiri dari institusi dan individual yang mendapatkan kepentingan mereka selama pemerintahan Assad. Termasuk pula di dalamnya loyalis dari kalangan elit ekonomi dan sosial, kalangan minoritas keagamaan, Syrian Arm Forces (militer resmi negara). Serta National Defences Forces (ARK Group, 2016, hal. 17). Selain itu beberapa aktor-aktor lain yang mendukung kelompok ini yaitu Rusia yang memberikan bantuan serangan udara, Hizbullah yang membantu mengirim tentara, Tiongkok, dan Iran.

2. Pasukan Oposisi Suriah

Tentara Pembebas Suriah atau Free Syrian Army, kelompok ini terdiri dari berbagai kelompok dan brigade lokal, didominasi oleh kelompok fundamentalis dan kurang-radikalis. Kelompok ini juga merupakan gabungan dari individu dan institusi yang pro terhadap ide-ide dari kelompok oposisi seperti National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces (NC). Selain itu kelompok oposisi juga memiliki ikatan dengan jaringan Salafi-Jihadi yaitu the Al-Nusra Front (ANF) (ARK Group, 2016, hal. 17). Dari internasional, kelompok oposisi didukung oleh Amerika Serikat beserta sekutu

termasuk Inggris dan Perancis, Liga Arab yang memberikan bantuan tentara, Turki, serta Yordania. Kelompok oposisi menguasai sebagian besar Aleppo dan daerah pinggiran Suriah.

3. Islamic State of Iraq and Levant

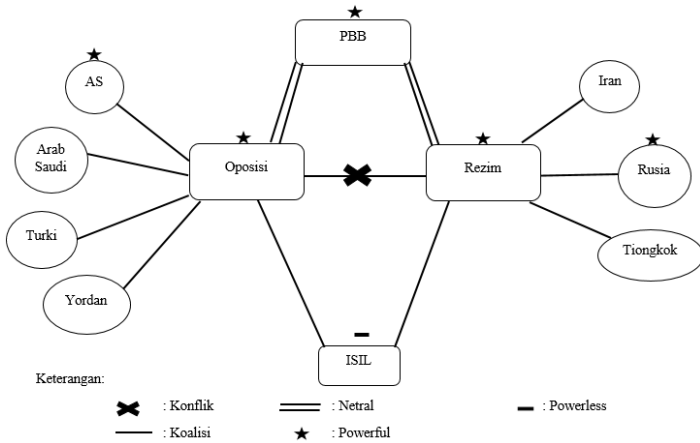
ISIL memproklamkan pembentukan negara islam dengan komposisi 80% orang non-Suriah, jihadis radikal, serta simpatisan dari seluruh dunia. ISIL terkonsentrasi dan menguasai sebagian besar Suriah bagian barat dan teritori Irak. ISIL dibentuk atas dasar tekanan dan teror dan hingga kini menjadi salah satu aktor dalam konflik Suriah atas kepentingannya mendompleng keinginan oposisi untuk membentuk pemerintahan baru setelah Bashar al-Assad digulingkan.

Selain aktor yang berkonflik, terdapat pula aktor keempat yaitu mereka yang menginginkan resolusi perdamaian di Suriah:

4. Aktor Perdamaian

Kelompok ini terdiri dari individu-individu serta institusi yang menginginkan adanya sebuah resolusi damai di Suriah. Individu ini mencakup jurnalis dan akademisi dari seluruh dunia serta institusi-institusi yang bergelut dalam bidang resolusi konflik. Sementara untuk pengimplementasian usaha resolusi sendiri masih menjadi tanggungjawab besar dari Perserikatan Bangsa Bangsa.

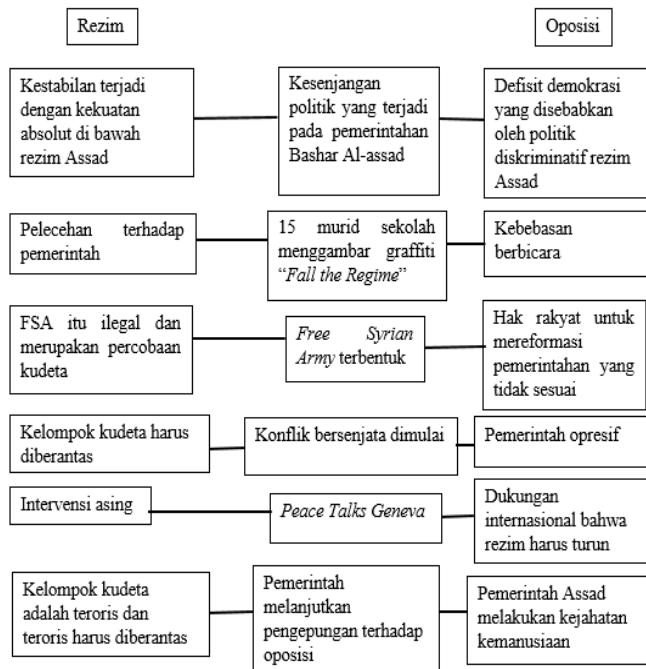
Hubungan antara aktor, kekuatan hubungan, serta pola koalisi dapat dilihat pada diagram berikut:



Bagan 3.3 Peta Konflik Suriah

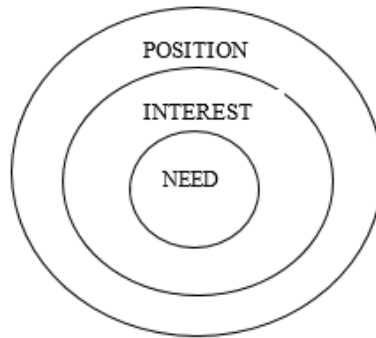
Assad secara konsisten telah menolak segala jenis reformasi yang dituntut oleh masyarakatnya sendiri sejak awal revolusi. Assad beranggapan bahwa untuk Suriah yang stabil dan lebih baik maka semua sektor baik itu politik, sosial, ekonomi, maupun peradilan harus berada di bawah kuasa keluarganya. Sementara itu, masyarakat Suriah percaya bahwa untuk Suriah yang lebih baik rezim Assad harus tumbang.

Dibawah ini merupakan Rangkaian Kejadian yang akan menunjukkan perbedaan perspektif dan identifikasi kejadian paling penting bagi setiap aktor:



Bagan 3.4 Rangkaian Kejadian dari perspektif pihak berkonflik

Untuk menganalisis perbedaan pandangan dalam konflik serta mengetahui posisi dan kepentingan aktor yang berkonflik, berikut adalah Analogi Bawang Merah:



	Rezim	Oposisi
Kebutuhan	Menciptakan kesejahteraan dan kestabilan politik	Menciptakan kesejahteraan dan kestabilan politik
Kepentingan	Kesejahteraan dan kestabilan politik dapat diciptakan dengan penguasaan segala aspek kenegaraan seperti militer, media, pasar, dan peradilan di bawah pemerintah	Kesejahteraan dan kestabilan politik dapat diciptakan dengan demokrasi dan keterbukaan pemerintah terhadap rakyat
Posisi	Mempertahankan rezim tetap berkuasa	Menggulingkan rezim

Bagan 3.5 Analogi Bawang Merah untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing aktor

Dalam memenuhi kebutuhan masing-masing aktor, kedua kelompok utama dalam konflik di Suriah menggunakan kekerasan koersif. Baik pemerintah maupun oposisi memilih untuk melakukan konflik bersenjata dan hingga kini belum ada satupun kesepakatan untuk mengatasi konflik yang terjadi.

dengan dimulainya demonstrasi masa damai pada bulan Maret 2011. Protes ini disambut dengan penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tindak kejahatan berat oleh pasukan Assad dan dinas keamanan. Demonstrasi damai tersebut menyebabkan penggunaan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pihak-pihak yang berperang di semua sisi yang telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap penduduk sipil pada khususnya. Konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Suriah selama enam tahun terakhir telah menimbulkan penderitaan luar biasa pada penduduk sipil. Konflik bersenjata Suriah telah menciptakan lebih dari 250.000 korban, 7,6 juta pengungsi internal dan 4,2 juta pengungsi (International Commission of Inquiry, 2015).

Ketika konflik bersenjata di Suriah berlangsung maka setiap pihak yang berkonflik memiliki kewajiban untuk menghormati konvensi-konvensi dan aturan-aturan yang mengatur hukum humaniter. Namun selama konflik bersenjata di Suriah terjadi dari tahun 2011 hingga saat ini, masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter yang terjadi yang kebanyakan dilakukan oleh tentara pemerintah.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh The Syrian Situation International Humanitarian Law Violations and the Call for Justice tahun 2011, tindakan represif yang berkembang menjadi perang sipil dan kemudian menjadi konflik bersenjata internasional di Suriah telah menjadi perhatian dunia sejak awal karena terlalu mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan tentara. Tentara pemerintah menargetkan semua orang yang ada di area konflik, bahkan sengaja menargetkan penduduk sipil. Serangan tanpa pandang bulu, tidak proporsional dan disengaja terhadap penduduk sipil, benda-benda yang dilindungi, pengepungan dan blokade yang ganas, pembatasan akses kemanusiaan, penggunaan senjata terlarang (seperti peluru kimia dan pembakar, munisi tandon,

dan ranjau anti-personil), penggunaan yang tidak sah senjata tanpa pandang bulu di daerah berpenduduk padat atau bahkan secara langsung melawan benda-benda sipil (roket, artileri berat, bahan peledak dan bom barel), teror dan kelaparan (Pinheiro, 2015) telah digunakan sebagai sarana berperang tanpa pengecualian.

Penduduk sipil menjadi sasaran utama kelompok bersenjata, yang tidak hanya gagal tapi juga tidak menahan diri untuk menggunakan alat tempur yang mampu membedakan antara penduduk sipil dan pejuang. Laporan telah menguatkan dugaan pembunuhan semena-mena, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, pemerkosaan, perbudakan seksual, pernikahan paksa, perekrutan tentara anak, sandera, penggunaan penduduk sipil sebagai perisai manusia, penargetan yang disengaja untuk minoritas agama dan seksual, perlakuan tidak manusiawi, pemaksaan hukuman atas pengepungan, blokade dan kelaparan (International Commission of Inquiry, 2015).

Perang juga telah melahirkan sejumlah besar pengungsi (setidaknya 7,6 juta pengungsi internal dan lebih dari 4 juta pengungsi) yang tidak menerima bantuan yang dipersyaratkan, yang melanggar kewajiban hukum internasional lainnya. Masyarakat internasional, pada kenyataannya, secara dramatis telah gagal melindungi pengungsi Suriah dan tidak mematuhi prinsip *non-refoulement* dan kewajiban mereka berdasarkan Hukum Adat dan Konvensional Internasional, khususnya instrumen Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perlindungan Pengungsi tahun 1951 dengan Protokol 1967.

Aktor negara bagian dan non-negara juga telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Suriah. Memang, penduduk sipil telah menjadi sasaran utama yang disengaja dari pihak-pihak dalam konflik

ini, tanpa terkecuali. Karena semua pihak dalam konflik telah menikmati kekebalan hukum atas kejahatan mengerikan ini, jalan menuju keadilan harus dibuka di Suriah dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili.

Negara dan aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam perang dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yaitu Pasukan Pemerintah selain dari Angkatan Darat Suriah, juga sangat bergantung pada pasukan asing, seperti milisi, pejuang Lebanon Shia Hizbullah dan pejuang Iran. Sejak tahun 2015 Assad juga mendapat dukungan udara yang signifikan dari Rusia. Assad secara terbuka membela intervensi pejuang Hizbullah, Iran dan Rusia di samping pasukan pemerintah (Aljazeera, 2015).

Berikut adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah:

1. Serangan terhadap penduduk sipil

Pasukan pemerintah telah melakukan serangan tanpa pandang bulu dan sengaja terhadap penduduk sipil, dan karena senjata unggulannya, dapat dikatakan bahwa pasukan pemerintah bertanggung jawab atas sebagian besar serangan udara tanpa pandang bulu di kota, desa, dan kamp pengungsian darurat sejak tahun 2011 (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2015). Jumlah korban jiwa dari penduduk sipil hingga Februari 2016 telah berjumlah setidaknya 470.000 (Human Rights Watch, 2017).

Bom barel telah dijatuhkan oleh pasukan pemerintah di pasar, sekolah, fasilitas medis dan lapangan. Selain itu, untuk memaksimalkan kematian dan luka-luka, seringkali putaran kedua bom dijatuhkan pada orang-orang yang berkumpul untuk

membantu orang-orang yang terluka (Pinheiro, 2015). Pada sebagian besar insiden yang diselidiki oleh Komisi Internasional Hak Asasi Manusia, dalam setiap serangan terhadap target sipil tidak ditemukan adanya bukti bahwa serangan tersebut sebenarnya ditargetkan kepada target militer (International Commission of Inquiry, 2015). Senjata kimia seperti gas klorin dan fosgen juga telah digunakan (International Commission of Inquiry, 2015).

Serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil dilakukan dengan maksud untuk menyebarkan teror di antara penduduk yang dianggap dekat dengan kelompok oposisi, atau membalas serangan kelompok pemberontak. Serangan tanpa pandang bulu telah memaksa penduduk sipil untuk melarikan diri. Pasukan pemerintah – termasuk, para militer, milisi pendukung asing dan lokal – terus menargetkan sasaran militer di dalam atau di dekat daerah berpenduduk sipil yang padat penduduknya (International Commission of Inquiry, 2015).

2. Kejahatan terhadap Tawanan

Penyiksaan yang meluas dan sistematis dengan jumlah yang luar biasa, telah didokumentasikan di fasilitas penahanan pemerintah, terutama Cabang Keamanan 215, 227 dan 235, termasuk terhadap perempuan, anak-anak dan orang tua (United Nations Human Rights Council, 2016). Kekerasan seksual dan pemerkosaan (terhadap tahanan laki-laki dan perempuan), penanguhan yang berkepanjangan, pemukulan sampai mati, eksekusi, kematian sebagai akibat perlakuan tidak manusiawi, dan sengatan listrik (termasuk kepada alat kelamin) telah terbukti (International Commission of Inquiry, 2015). Kondisi di pusat penahanan tidak manusiawi. Terdapat pola-

pola dimana lelaki dewasa tiba-tiba hilang begitu saja, meskipun pola ini telah terjadi sejak awal mula pemberontakan.

3. Pengepungan

Pasukan pemerintah menggunakan kelaparan dan teror sebagai alat perang dalam pengepungan ganas, dengan tujuan membuat hidup tak tertahankan bagi penduduk yang dianggap dekat dengan oposisi, bahkan jika hanya karena lokasi fisik mereka. Kamp Yarmouk dikepung oleh pasukan pemerintah selama lebih dari tiga tahun (International Commission of Inquiry, 2015). Penduduk telah meninggal sebagai konsekuensi kurangnya perawatan medis dan bantuan, kelaparan, dan serangan penembak jitu. Komisi Independen mendokumentasikan contoh di mana penduduk harus makan hewan piaraan dan daun untuk bertahan hidup. Penembak jitu mencegah penduduk sipil meninggalkan daerah yang dikepung; perempuan, anak-anak dan orang tua juga menjadi sasaran. Bantuan kemanusiaan sengaja diblokir. Pemerintah terus mengepung kamp Yarmouk di Damaskus serta Ghouta timur, Zabadani dan Madaya¹ (International Commission of Inquiry, 2015).

¹ Kelompok bersenjata anti-pemerintah telah memberlakukan pengepungan di sekitar kota Nubul dan Zahra (Aleppo) dan sekitar Foua'a dan Kafria (Idlib). Situasi di kota-kota Idlib ini dilaporkan mengerikan – kekurangan makanan, air, obat-obatan dan listrik. Pada bulan Januari, ISIL mengepung Al-Jabal, Al-Joura, Al-Ahrabish dan Al-Qousour, semua distrik berpenduduk padat di kota Dayr Az-Zawr, yang tetap berada di bawah kendali pemerintah. Ratusan ribu penduduk sipil sejak itu hidup dengan akses minimum terhadap makanan, obat-obatan, air, listrik dan bahan bakar. Komunitas yang terkepung ini bertahan dengan roti dan air. Akses terhadap air bersih

Pengelompokan ini telah berlangsung hampir tiga tahun dan mengakibatkan penduduk sipil kelaparan sampai mati, atau meninggal karena penyakit kronis atau luka-luka yang diderita dalam pemboman udara dimana ada sedikit atau tidak ada layanan medis yang tersedia. Diperkirakan bahwa 40% anak-anak di kamp Yarmouk menderita kekurangan gizi. Bantuan makanan dan barang-barang lainnya yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil ditahan dan dilarang. Tindakan ini bertujuan untuk memaksa daerah-daerah tunduk kepada pemerintah. Tindakan ini merupakan strategi pemerintah untuk membuat penduduk sipil 'menyerah atau kelaparan'.

4. Penggunaan Senjata yang Dilarang

Pada bulan Agustus 2013, telah terjadi serangan mendadak dengan roket pembawa hulu ledak di kota Damaskus tepatnya di wilayah Ghouta. Roket pembawa hulu ledak tersebut mengandung zat kimia jenis gas Sarin² (Secretary General Report of CW Investigation, 2013). Zat kimia tersebut terungkap setelah tim pemantau senjata kimia PBB

terbatas, dan kasus diare, dehidrasi dan penyakit saluran pencernaan meningkat.

² Sarin atau GB, adalah senyawa *posphorous* dengan formula $(\text{CH}_3\text{-P}(=\text{O})(-\text{F})(-\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)$. Ia adalah cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau yang digunakan sebagai senjata kimia dengan efek ekstrim yang berpotensi sebagai perusak sistem saraf (*nerve agent*). Gas Sarin ini telah diklasifikasi sebagai “Senjata Pembunuh Massal” pada Resolusi PBB 687. Produksi dan penyimpanan Gas Sarin ini telah dilarang oleh *Chemical Conventions Weapon* pada tahun 1993 yang mana ia diklasifikasikan kepada zat kimia level 1. Sumber: *About Chemical Weapons: Types of Chemical Agents* pada laman *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* diakses dari <http://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/nerve-agents/> pada 7 November 2017 14.41 WIB

melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang jatuh akibat serangan roket dengan hulu ledak tersebut. Berdasarkan hasil sampel darah dan urin para korban yang didapatkan oleh tim pemantau senjata kimia PBB terbukti bahwa roket tersebut membawa hulu ledak bermuatan gas beracun jenis Sarinida (Secretary General Report of CW Investigation, 2013).

Pada Juli 2017, pemerintah Suriah kembali melakukan penyerangan dengan menggunakan gas Sarin di Khan Sheikhoun, Idlib. Secara keseluruhan, penyidik PBB mengatakan bahwa mereka telah mendokumentasikan 33 serangan senjata kimia di [Suriah](#) hingga saat ini (Ferida, 2017). Kemudian penggunaan senjata tanpa pandang bulu, termasuk amunisi Sarin dan munisi tandan terus digunakan di daerah berpenduduk sipil selama periode yang ditinjau. Penggunaan semacam itu merupakan kelanjutan dari tren dan insiden yang dilaporkan pada periode yang sama di kota Aleppo, senjata-senjata ini digunakan secara eksklusif oleh pasukan Pemerintah dan pro-pemerintah, di wilayah-wilayah di negara tersebut terkena serangan pemerintah yang terkonsentrasi, yang menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sipil di dalamnya. Human Rights Council juga terus mendokumentasikan penggunaan munisi tandan oleh pasukan pro-pemerintah di seluruh Suriah disamping serangan di Aleppo. pesawat Suriah atau Rusia terus menyebarkan munisi tandan di serangan udara daerah berpenduduk sipil di Idlib, Douma, Dayr az-Zawr, dan Aleppo. Menggunakan munisi tandan di daerah berpenduduk padat dengan tidak pandang bulu merupakan kejahatan perang yaitu serangan sembarangan di daerah berpenduduk sipil (Human Rights Council, 2017).

Assad telah berkali-kali mengelak tuduhan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, namun laporan yang datang dari berbagai macam organisasi kemanusiaan dan tim penemu fakta menyatakan yang sebaliknya. Pelanggaran yang terjadi di konflik Suriah sudah terlalu masif dan berlarut-larut. Kota-kota di Suriah menjadi reruntuhan, ratusan ribu manusia tewas, lebih banyak lagi manusia yang menderita, dan setidaknya 5,1 juta penduduk Suriah menjadi pengungsi (World Vision, 2017).

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tentara pemerintah terhadap hukum humaniter internasional kebiasaan dapat dilihat pada tabel 3.2 di halaman Lampiran.

C. Upaya ICRC dalam Mengawasi Penghormatan Hukum Humaniter di Suriah

1. Kegiatan ICRC di Suriah

1.1. *Responsibility to Prevent*

Konflik Suriah yang belum berakhir mengakibatkan keterbatasan akses kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, obat-obatan dan tempat tinggal. Banyak keluarga yang kehilangan rumah dan terpaksa bertahan hidup tanpa listrik, air minum yang memadai, infrastruktur dasar rusak dan minimnya layanan kesehatan masyarakat. Bahkan sistem pelayanan kesehatan yang tersisa terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak menjadi sasaran serangan pihak-pihak berkonflik (ICRC, 2013). Kepala Operasi ICRC untuk Timur Tengah, Robert Mardini juga mengatakan bahwa rakyat sipil yang terperangkap di daerah-daerah dimana bantuan kemanusiaan tidak diizinkan masuk merupakan

kategori yang paling rentan terlebih saat Suriah memasuki musim dingin (ICRC, 2013).

Agenda kegiatan ICRC bersifat preventif yang bertujuan untuk meminimalkan dampak konflik serta efek-efek buruk yang bisa saja timbul. Oleh karena itu, ICRC melakukan diseminasi hukum humaniter internasional dalam berbagai aspek kegiatan untuk mencegah dan membatasi kemungkinan terburuk konflik. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif ini akan memengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku untuk melindungi korban-korban yaitu rakyat sipil ataupun tentara-tentara yang terluka pada saat konflik berlangsung. Sehingga kemudian akan ada upaya melakukan peningkatan keamanan serta memberikan fasilitas akses medis serta bantuan kemanusiaan lain. Sasaran-sasaran utamanya adalah angkatan bersenjata, pihak keamanan dalam kepolisian, pasukan khusus, para tokoh masyarakat, pengambil keputusan, para remaja dan akademisi. Pihak-pihak ini dinilai lebih mudah memahami hukum humaniter internasional dan dapat memberikan pemahaman terhadap pihak lain di sekitar area konflik.

Pencegahan juga dilakukan dalam hal komunikasi yaitu ICRC dalam misi menyebarkan hukum humaniter internasional berusaha mendorong pemerintah Suriah untuk menerapkan kebijakan nasional yang mendukung hukum dan advokasi tentang hak asasi manusia khususnya terhadap anak-anak dan perempuan serta bagaimana melindungi keamanan kemanusiaan. ICRC melakukan advokasi kepada pemerintah Suriah agar memperbaiki sektor sosial dan menjamin hak anak-anak terlebih kepada anak-anak yatim piatu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan secara layak. Perlindungan kepada kaum perempuan ditunjukkan agar mereka mendapatkan rasa aman, tidak mengalami kekerasan fisik maupun mental dan

segala bentuk pelecehan seksual. Pengembangan pendidikan diberikan juga kepada para perempuan sebagai pengembangan diri dalam emansipasi wanita. Selain itu, ICRC memberikan pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dan bentuk perlindungannya. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan dan mengintegrasikan hukum humaniter internasional dalam kurikulum resmi kegiatan pengajaran, pelatihan, hukum dan sektor lainnya. Hal ini bertujuan agar rakyat Suriah mudah mengetahui seberapa penting perlindungan hak asasi manusia dan mereka dapat memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mengandalkan alat militer. ICRC banyak terfokus dan memprioritaskan sektor pendidikan, bahkan mengembangkan pendidikan berprofesi hukum, politik dan jurnalisitik karena bidang-bidang ini memiliki keterkaitan yang cukup erat pada hukum humaniter internasional.

Untuk mewujudkan upaya-upaya pencegahan tersebut, ICRC berusaha untuk selalu dekat dengan para korban agar mudah untuk mengingatkan pemerintah atas tanggungjawabnya melindungi rakyat sipil, tawanan dan prajurit yang terluka sesuai aturan kemanusiaan. Selain itu, ICRC berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah Suriah untuk membuat sebuah tindakan pencegahan demi memperbaiki keadaan penduduk yang terkena dampak konflik. Mereka yang mendapatkan perlindungan yang pertama adalah penduduk sipil yang notabene tidak terlibat dalam konflik sehingga tidak boleh diserang, mereka harus diselamatkan dan dilindungi (ICRC, 2006). Yang kedua adalah tahanan perang, dimana ICRC berkewajiban dan diberikan hak untuk mengunjungi para tahanan untuk mencegah kasus orang hilang serta kemungkinan adanya perlakuan yang tidak baik kepada para tahanan

tersebut. Kemudian untuk memulihkan kontak antara tahanan dan keluarganya serta memperbaiki kondisi tahanan sesuai batasan wajar yang berlaku untuk meminimalisir ketidaklayakan kondisi yang diterima.

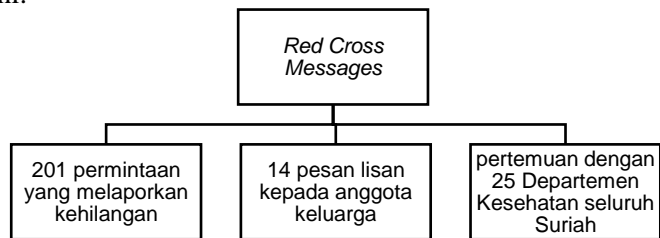
Untuk memaksimalkan misi kemanusiaannya, ICRC melakukan diplomasi kemanusiaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya LSM-LSM pembela HAM dan organisasi internasional yang fokus pada permasalahan HAM, ICRC mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang lain. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak tersebut mengetahui agenda kerja ICRC di Suriah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan kemanusiaan oleh beberapa pihak. Dengan adanya laporan ini maka pihak-pihak lain dapat melakukan agenda kegiatan mereka dalam sektor lain atau melakukan kerjasama dengan ICRC.

1.2. *Responsibility to Rebuild*

Selain menyebabkan banyaknya korban jiwa dan pengungsi, tentara pemerintah juga merusak bangunan-bangunan kota yang dilindungi oleh konvensi. Kota bersejarah terbesar yaitu Aleppo mengalami kehancuran fatal, bahkan kompleks Masjid Umayyah yang sangat terkenal juga hancur termasuk kota kuno yang berada di Bosra Selatan. Beberapa bangunan lain yang merupakan warisan dunia UNESCO hanya menjadi bangunan-bangunan tua yang diabaikan. Kota-kota konflik di Suriah mayoritas mengalami kerusakan total dan ditinggalkan begitu saja. Fasilitas publik tidak berfungsi, bangunan sekolah rusak, gedung rumah sakit mengalami kerusakan yang mengakibatkan sulitnya pemberian layanan kesehatan kepada para korban.

Dengan situasi Suriah yang kian memburuk karena kehancuran kota dan kerusakan fasilitasnya, ICRC menjalankan misinya dengan memberikan bantuan kepada para korban. ICRC berusaha mengoordinasi, memberikan bantuan finansial, serta menjamin hak-hak masyarakat sipil agar terpenuhi serta memastikan mereka mendapatkan perawatan dan penanganan medis yang layak. Sebanyak 70 truk pembawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan untuk pertama kalinya di kota-kota terkepung di Suriah. Bantuan diberikan di wilayah dekat Damaskus yaitu Madaya dan Zabdani serta Desa Al-Foua dan Kefraya di barat laut Suriah. Menurut data PBB, di Madaya terdapat 40 ribu masyarakat sipil yang terkepung oleh tentara Pemerintah Suriah selama kurang lebih enam bulan. Sementara di Zabadani sebanyak seribu jiwa, Kefraya dan Al-Foua sebanyak dua puluh ribu jiwa. Kota-kota ini mulai dikepung tentara pemerintah Suriah sejak April 2015 (Ratna, 2016).

Dalam mengembalikan keluarga-keluarga yang terpisah akibat konflik bersenjata di Suriah, ICRC menginisiasi program *Central Tracing Agency* (ICRC, 2014) yang dijabarkan dalam bagan dibawah ini:



Bagan 4. 7 Program Central Tracing Agency: Red Cross Messages

Selain itu, sebanyak 350 staf telah dikerahkan di berbagai wilayah Suriah untuk membantu menyediakan makanan, air, obat-obatan serta kebutuhan penting lainnya (ICRC, 2016). ICRC juga menyelenggarakan kerjasama untuk beberapa program pembangunan dan bantuan logistik (ICRC, 2014) yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Program	Kerjasama	Kegiatan	Keterangan
Air dan Habitat	Syrian Arab Red Crescent	<ul style="list-style-type: none"> - instalasi dan distribusi air bersih - perbaikan sistem pengairan - sterilisasi habitat 	Bantuan revitalisasi pengairan kepada 170.865 penduduk di Damaskus, Aleppo, Homs
Pembangunan Fasilitas Umum		<ul style="list-style-type: none"> - Renovasi bangunan - Pengolahan limbah - Standar pelayanan fasilitas publik 	Pembuatan dapur umum untuk 17.000 pengungsi di Damaskus, Homs, Lattakia dan logistik 150.000 pengungsi

Finansial Kesehatan	Syrian Arab Red Crescent	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pertolongan pertama - Memperbaiki fasilitas rumah sakit 	Bantuan kepada 9 klinik di Damaskus, Aleppo, Idib, Homs, Hama dan pelatihan pertolongan pertama 90 relawan
Save the Children	UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi - Pendidikan 	Terapi dan persediaan perlengkapan sekolah bagi 4.000 anak di Damaskus

Tabel 4.11 Daftar program Responsibility to Rebuild ICRC di Suriah

2. Upaya ICRC Menghentikan Pelanggaran Hukum Humaniter

ICRC dan gerakan kemanusiaan lainnya memfokuskan kegiatan mereka untuk menolong dan membantu keberlangsungan hidup orang-orang di sekitar konflik. Selain itu ICRC juga memiliki fungsi lain berkaitan dengan pengawasan hukum humaniter internasional.

Sejauh ini ICRC sudah menjalankan fungsi pemantauan, katalisator, pengawasan, dan promosi hukum humaniter namun fungsi yang dijalankan ini tidak juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan ICRC dalam mengurangi pelanggaran hukum humaniter diantaranya yaitu:

1) Pada September 2011, Jakob Kellenberger, Presiden ICRC, mengunjungi Damaskus selama dua hari untuk bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad, Perdana Menteri Adel Safar, Walid Muallem, Menteri Luar Negeri dan para ekspatriat serta the Syrian Arab Red Crescent. Dalam pertemuan ini, ICRC memantau kemajuan perizinan gerakan-gerakan kemanusiaan untuk bergerak dalam area konflik, kesempatan untuk mendiskusikan kunjungan ICRC ke orang-orang yang ditahan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan akses ke penanganan kesehatan. Pertemuan ini dibarengi dengan sanksi yang dikeluarkan oleh European Union terhadap Suriah berupa embargo minyak dan larangan bepergian (ICRC, 2011). Pertemuan ini menandai dimulainya operasi ICRC secara resmi pada 2012 dimana ICRC diizinkan masuk ke medan-medan konflik untuk memberikan bantuan kesehatan dan logistik terhadap penduduk sipil. Bantuan yang diberikan masih terbatas karena ICRC serta Gerakan Palang Merah lainnya masih menemui kesulitan dalam mengakses korban-korban konflik.

2) Setahun kemudian pada September 2012, Presiden ICRC Peter Maurer mengunjungi Presiden Bashar al-Assad dan membicarakan masalah pelaksanaan konflik yang merugikan rakyat sipil. Pertemuan ini diadakan atas semakin buruknya situasi kemanusiaan di Suriah dimana kebutuhan dasar penduduk di sekitar konflik tidak dapat terpenuhi. Maurer menyatakan bahwa pertemuan ini memberikan sinyal positif terhadap keberlangsungan isu humaniter di konflik Suriah (ICRC, 2012). Meskipun demikian, pemerintah Suriah tetap memberikan beberapa larangan keras dalam operasi bantuan yang diberikan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan dan menolak pembangunan koridor kemanusiaan walaupun krisis terus berlanjut.

3) Presiden ICRC Peter Maurer mengunjungi Suriah dua kali pada tahun 2014. Selama kunjungannya pada bulan Januari dan November, dia bertemu dengan pejabat senior Suriah dan pejabat Suriah Red Crescent, serta orang-orang yang terkena dampak konflik tersebut, dan mengunjungi proyek bersama ICRC-Suriah Arab Red Crescent yang melayani komunitas di garis depan (ICRC, 2015). ICRC terus mencari cara untuk mengunjungi semua wilayah yang terkena dampak konflik. Setelah pertemuan, ICRC dapat mengakses Aleppo, Homs, dan daerah pinggiran Damaskus dimana konflik paling intens terjadi. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter dalam pelaksanaan konflik tetap terjadi.

4) Pada 2016, dengan semakin menumpuknya korban konflik, ICRC mengeluarkan pernyataan umum untuk menghentikan segala serangan di seluruh Suriah saat itu juga.

"Tidak ada alasan untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan dengan sengaja yang menargetkan rumah sakit dan klinik, yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Orang-orang terus-menerus mati dalam serangan ini. Tidak ada tempat yang aman lagi di Aleppo bahkan di rumah sakit," kata Marianne Gasser, kepala ICRC di Suriah. "Demi orang-orang di Aleppo, kami menyerukan agar semua orang menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu ini." Pernyataan ini dikeluarkan setelah adanya serangan terhadap rumah sakit Al-Quds yang menewaskan banyak orang (ICRC, 2016).

Selain itu Presiden ICRC Peter Maurer juga mengunjungi Suriah dua kali selama tahun 2016, ia bertemu dengan pejabat senior Suriah termasuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Administrasi Lokal, serta Menteri Dalam Negeri, Kesehatan, Sumber Daya Air, Rekonsiliasi Nasional,

dan Wakil Menteri Luar Negeri. Dia juga bertemu dengan pimpinan dan relawan dari Syrian Arab Red Crescent (SARC).

Dia mengunjungi Al Waer dan Kota Tua Homs serta Yelda, Babila dan Beit Sahem di Pedesaan Damaskus, di mana puluhan ribu orang telah berjuang untuk bertahan hidup. Di Al Waer, Yelda dan Babila, dia bertemu dengan warga sipil yang telah terpengaruh oleh situasi dan tokoh masyarakat dan komite yang mewakili oposisi bersenjata. Setelah kunjungan tersebut, Maurer juga mengeluarkan pernyataan berikut:

"Inilah saatnya bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik yang menghebohkan ini dan inilah saatnya bagi kekuatan dunia yang dapat mempengaruhi situasi untuk bertindak secara meyakinkan. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional adalah ciri perang yang konstan dan mengerikan dalam perang di Suriah. Pelanggaran ini menyebabkan banyak penderitaan tak perlu yang tak terbayangkan, ". (ICRC, 2016).

Terlepas dari dialog-dialog yang dilakukan oleh ICRC dengan pemerintah Suriah untuk menghentikan pelanggaran, pelaksanaan konflik bersenjata di Suriah tetap berjalan tanpa adanya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengeboman terhadap fasilitas publik berupa rumah sakit di Aleppo pada Februari 2016. Pernyataan tentang pelanggaran (*public shame*) yang dilakukan oleh ICRC juga tidak mengurangi intensitas pelanggaran yang terjadi di dalam konflik.

Melihat upaya-upaya dan mekanisme yang dilakukan oleh ICRC untuk menghentikan pelanggaran hukum humaniter tidak memberikan hasil yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kekurangan dalam otoritas legal rasional yang diberikan oleh ICRC dalam memenuhi mandatnya sebagai pengawas hukum humaniter internasional.